

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menyiapkan sumber daya manusia dalam pembangunan nasional. Pendidikan dipandang sebagai proses investasi dalam bentuk pengembangan mutu sumberdaya manusia yang terwujud dalam sosok “manusia terdidik” (*educated people*). Pencapaian kemajuan pendidikan pada hakekatnya merupakan hasil kinerja manusia. Jika suatu bangsa tidak mampu mengembangkan sumber daya manusia yang dimilikinya, maka bangsa tersebut tidak akan mampu menjalankan roda pembangunan secara optimal dan akan kalah ketika bersaing dengan bangsa-bangsa lainnya. Pembangunan mutu sumberdaya manusia adalah salah satu kondisi yang sangat diperlukan untuk semua pertumbuhan.

Mutu pendidikan berkaitan dengan dua sisi yang sangat penting yaitu proses dan hasil. Mutu dalam proses pendidikan melibatkan faktor masukan, proses, dan hasil. Masukan pendidikan seperti: bahan ajar (*kognitif, afektif, atau psikomotorik*), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana dan prasarana lembaga pendidikan, dukungan administrasi, berbagai sumber daya dan upaya penciptaan suasana yang nyaman untuk belajar. Mutu dalam konteks proses adalah kualitas pembelajaran dialami/didapatkan oleh peserta didik. Mutu dalam konteks “hasil pendidikan” mengacu pada prestasi yang dicapai oleh lembaga pendidikan pada setiap kurun waktu tertentu. Tuntutan terhadap lulusan dan layanan lembaga pendidikan yang bermutu semakin mendesak karena semakin ketatnya persaingan bagi setiap lulusan pendidikan dalam menciptakan, membuat atau mengembangkan lapangan kerja. Oleh karena itu persaingan antar lembaga penyelenggara pendidikan dan pasar kerja akan semakin berat.

Mengantisipasi perubahan-perubahan yang begitu cepat serta tantangan yang semakin besar dan kompleks, tidak ada jalan lain bagi lembaga pendidikan kecuali hanya mengupayakan berbagai cara untuk meningkatkan daya saing

lulusan serta produk-produk akademik dan layanan lainnya, antara lain dicapai melalui peningkatan mutu pendidikan.

Berkenaan dengan mutu, hasil pendidikan di Indonesia dapat dikatakan masih belum mencapai target mutu sebagaimana diharapkan oleh pemangku kepentingan. Hal ini terlihat dari indeks pembangunan pendidikan untuk semua atau *education for all*, posisi Indonesia untuk tahun 2014 berada di peringkat ke-57 dari 115 negara. Berdasarkan data dalam *Education For All (EFA) Global monitoring report: the hidden crisis, armed Conflict and Education* yang dikeluarkan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) yang diluncurkan di New York, total nilai EDI itu diperoleh dari rangkuman perolehan empat kategori penilaian, yaitu:

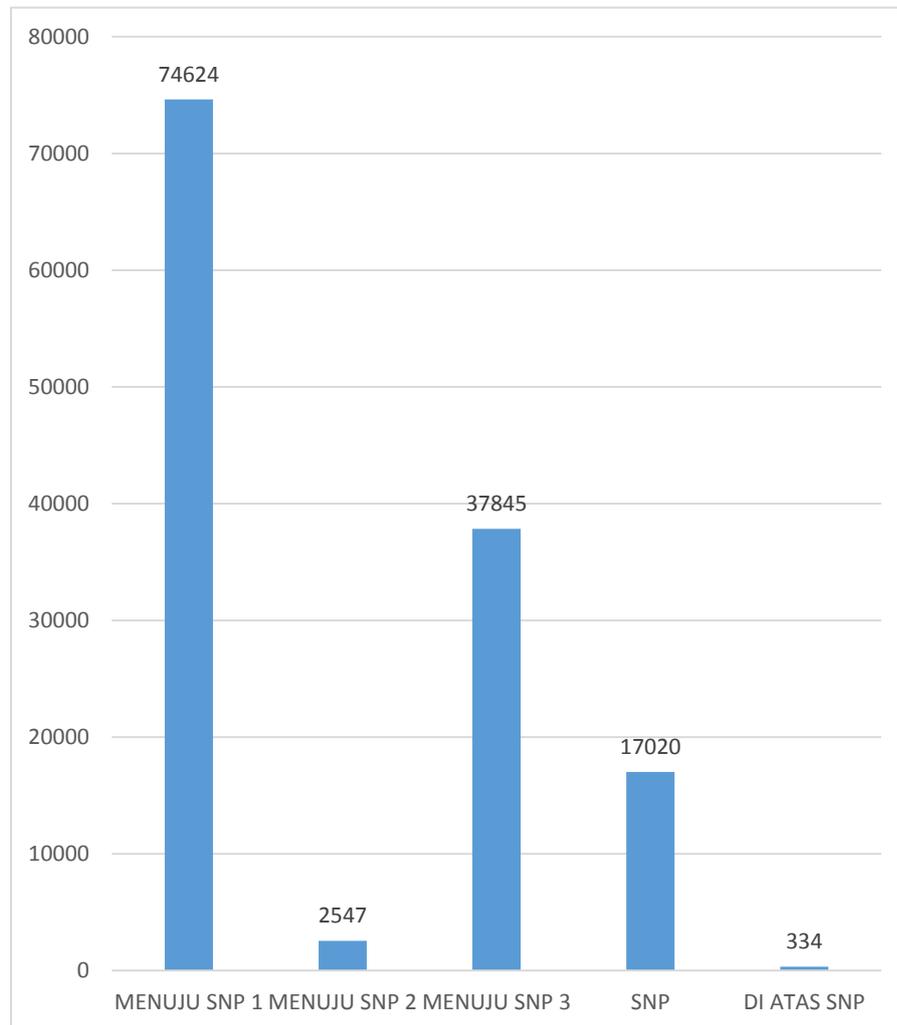
1. Angka partisipasi pendidikan dasar,
2. Angka melek huruf pada usia 15 tahun ke atas,
3. Angka partisipasi menurut kesetaraan gender,
4. Angka bertahan siswa hingga kelas V sekolah dasar (SD).

Sumber: <http://www.kemendikbud.go.id>

Adapun Negara Indonesia mencapai pada posisi ke-57 berdasarkan nilai EDI. Melihat kondisi di atas, Pemerintah dan semua pihak sudah seharusnya memperhatikan pelaksanaan pendidikan di Negara ini. Khususnya pada pendidikan dasar, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 17 mengenai Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan bahwa pendidikan dasar dilaksanakan dalam bentuk sekolah dan madrasah. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan, sikap, dan keterampilan bagi anak didik. Pendidikan dasar ini selanjutnya dikembangkan untuk meningkatkan kualitas diri anak didik. Ketiga aspek tersebut merupakan landasan pendidikan yang paling utama karena ketiganya merupakan hal paling hakiki dalam kehidupan.

Berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah yang dilakukan oleh sekolah-sekolah di Indonesia pada tahun 2013 melalui sistem website <http://padamu.kemendikbud.go.id> yang dikembangkan oleh badan PSDM dan PMP Kemendikbud teridentifikasi sejumlah SD yang melaksanakan EDS pada

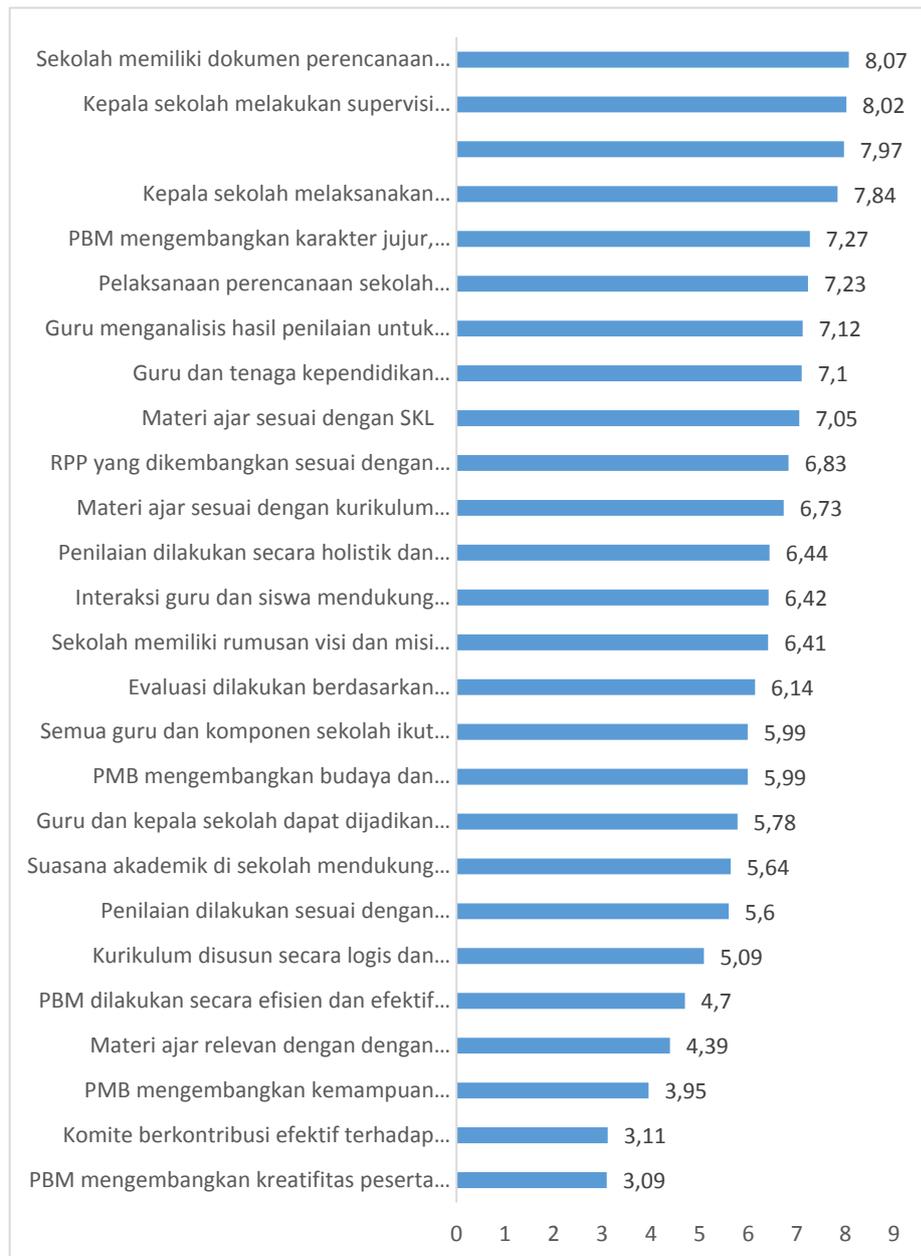
tahun 2013 sebanyak 132.370 SD dari 148.107 SD atau 89,4%. Hasil EDS menunjukkan gambaran pemenuhan SNP sebagai berikut.



Gambar 1.1

Distribusi jumlah SD berdasarkan level capaian SNP tingkat nasional

Berdasarkan sebaran indikator SNP, data pemenuhan SNP di SD dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1.2

Sebaran nilai setiap indikator SNP pada tingkat SD secara nasional

Berdasarkan data hasil EDS tersebut masih banyak SD yang belum memenuhi SNP. Permasalahan ini ada pada komponen input pendidikan yang berpengaruh terhadap proses dan pelaksanaan pendidikan.

Dalam kebermutuan lulusan dan relevansi hasil pendidikan dengan kebutuhan masyarakat, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2014 mengenai penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, didapatkan suatu kecenderungan bahwa lulusan pendidikan SD lebih mendominasi dunia kerja dibandingkan lulusan SMA/SMK dan perguruan tinggi. Berikut data yang dilansir oleh BPS dalam berita resmi statistik pada bulan mei 2014:

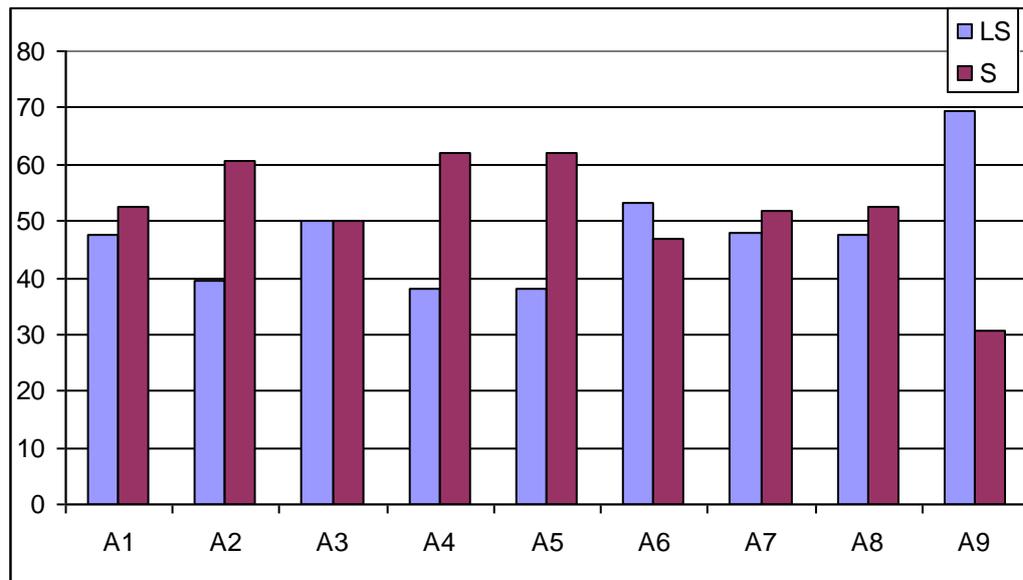
Tabel 1.1
Penduduk usia 15 tahun atas yang bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, 2012-2014 (juta orang)

Pendidikan tinggi yang ditamatkan	2012*)		2013*)		2014*)
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SD ke bawah	57,33	55,62	56,49	53,81	55,31
Sekolah Menengah Pertama	20,34	20,27	20,36	20,56	21,06
Sekolah Menengah Atas	17,34	17,40	17,95	17,88	18,91
Sekolah Menengah Kejuruan	9,55	9,61	10,32	9,97	10,91
Diploma I/II/II	3,15	3,01	3,25	2,93	3,13
Universitas	7,37	7,10	8,07	7,61	8,85
Jumlah	115,08	113,01	116,44	112,76	118,17

Sumber: berita resmi statistic No. 38/05/Th. XVII, 5 Mei 2014, hal. 5

*) Februari 2012-Agustus 2013 merupakan hasil *back casting* dari penimbang proyeksi penduduk yang digunakan pada februari 2014

**) estimasi ketenagakerjaan februari 2014 menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk



(sumber: Bappenas, 2009:4)

Gambar 1.3

Tingkat Kepuasan Orangtua terhadap Sembilan Atribut Pelayanan Pendidikan Dasar pada Jenjang SD (%)

Catatan: LS= Kurang Puas; S= Puas

A1= Kualitas Proses Pembelajaran;

A2= Kualitas Pengajaran;

A3= Hasil dari Proses Pembelajaran yang berdampak pada kualitas SDM anak;

A4= Kondisi kenyamanan sekolah;

A5= Menjaga disiplin dan keamanan di sekolah;

A6= Keterlibatan orangtua;

A7= Kualitas Fasilitas Fisik;

A8= Kesiapan alih tahun pelajaran;

A9= Ketersediaan Biaya Sekolah Anak.

Data tersebut menunjukkan adanya ketidakpuasan orang tua untuk masing-masing komponen di sekolah dasar. Ketidakpuasan ini khususnya terkait dengan pelayanan dalam A1 (kualitas proses Pembelajaran), A3 (hasil dari proses Pembelajaran yang berdampak pada kualitas SDM anak), A6 (keterlibatan orangtua), A7 (kualitas fasilitas fisik), A8 (kesiapan alih tahun Pelajaran), dan A9

(ketersediaan biaya sekolah anak). Sumber bappenas mengenai tingkat kepuasan yang dirasakan oleh para orang tua dilihat dari Sembilan atribut pendidikan menjelaskan tinggi rendahnya kepuasan pelanggan terhadap pendidikan merupakan penilaian pelanggan terhadap proses dan hasil pendidikan.

Masalah lain yang ditemukan adalah dari penelitian yang dilakukan oleh Ade Rahmi M (2003, hlm. 7) yang menunjukkan rendahnya penyediaan fasilitas pendidikan di sekolah dasar kota Bandung.

Kebutuhan terhadap fasilitas pendidikan SD dalam studi ini dipresentasikan oleh jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Kebutuhan fasilitas SD di Kecamatan Batununggal adalah sebesar 12.683 orang. Sedangkan jumlah fasilitas pendidikan SD yang terdapat pada kecamatan tersebut mempunyai kapasitas 10.960 orang. Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh pada analisis indikator pemenuhan kebutuhan, kapasitas yang ada hanya dapat menampung sekitar 87% dari kebutuhan. Dengan demikian sediaan fasilitas pendidikan SD di Kecamatan Batununggal tidak dapat memenuhi kebutuhan yang ada.

Menurut Cipi Triatna dalam bukunya "*Pengembangan Kapasitas Manajemen Sekolah*" (2015, hlm 7) permasalahan rendahnya mutu pendidikan dari sudut pandang sistem, yaitu masalah ada pada komponen masukan (*input*), proses, hasil pendidikan (*output*), dan dampak (*outcome*) pendidikan. Masalah pendidikan dilihat dari komponen masukan adalah terkait dengan pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) yang seharusnya disediakan secara penuh untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan.

Triatna (2015, hlm. 8) menduga bahwa masalah rendahnya mutu pendidikan yang disebabkan oleh rendahnya profesionalitas SDM pendidikan tidak dapat dipecahkan dengan melatih semua PTK yang ada selama kurun waktu tertentu, semisal selama satu bulan. Masalah mutu sekolah dalam perspektif sistem melekat dengan setiap komponen sistem. Kapasitas manajemen sekolah yang rendah akan mengakibatkan mutu pendidikan menjadi rendah. Masalah ini dapat dielaborasi secara lebih rinci berdasarkan sistem manajemen sekolah yang dilakukan sekolah dalam setiap tahunnya, yaitu: masukan, proses, hasil. Komponen masukan merupakan 8 standar nasional pendidikan, komponen proses merupakan proses pedagogik yang dikenal dengan proses pembelajaran, dan hasil

pembelajaran dalam bentuk kompetensi lulusan. Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh sekolah dasar haruslah menjadi perhatian yang sangat besar dari berbagai pihak. Karena akan berdampak pada pendidikan yang berkualitas bagi peserta didik.

Merujuk pada penelitian sebelumnya dalam Disertasi Cipi Triatna yang berjudul “Pengembangan Kapasitas Manajemen Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah” disebutkan bahwa tinggi rendahnya kapasitas manajemen sekolah dalam mengelola berbagai sumber daya sekolah menjadi penentu berkualitas atau tidaknya proses pendidikan yang dialami oleh setiap peserta didik di sekolah. Ingraham, Joyce, dkk. (2003, hlm. 15) mendefinisikan kapasitas manajemen sebagai kemampuan dasar pemerintah untuk menyusun, mengembangkan, mengarahkan, dan mengontrol sumber daya organisasi berupa: keuangan, SDM, fisik, dan informasi. Dalam konteks sekolah, kapasitas manajemen sekolah diterjemahkan dari istilah *School Management Capacity* (SMC). Komba, Nkumbi, dan Warioba dalam Triatna (2015, hlm. 66) bahwa SMC adalah potensi dan aktualisasi potensi yang dimiliki sekolah, termasuk potensi yang berada di organisasi dan sumber daya sekolah yang berada di sekitar lingkungan sekolah yang dapat didayagunakan untuk mendukung, memelihara, dan mengembangkan mutu proses belajar-mengajar.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul: “*Pengaruh Kapasitas Manajemen Sekolah terhadap Mutu Pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Bandung*”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan sebelumnya, maka peneliti menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kapasitas manajemen sekolah pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Bandung ?
2. Bagaimana mutu pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Bandung ?
3. Seberapa besar pengaruh kapasitas manajemen sekolah terhadap mutu pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Bandung.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1. Tujuan Umum

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai Pengaruh Kapasitas Manajemen Sekolah terhadap Mutu Pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Bandung.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- 1) kapasitas manajemen sekolah pada Sekolah Dasar Negeri,
- 2) mutu pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Bandung, dan
- 3) besaran pengaruh kapasitas manajemen sekolah terhadap mutu pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak berikut ini.

1. Manfaat secara teoritik

Hasil penelitian dapat bermanfaat untuk memperkaya teori pengembangan kapasitas manajemen sekolah dan mutu pendidikan di sekolah, khususnya pada tingkat sekolah dasar.

2. Manfaat dari segi praktik

- a. Bagi praktisi pengelola sekolah. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menjadi masukan dalam penyusunan program pengembangan kapasitas manajemen sekolah serta dalam upaya pencapaian dan perbaikan mutu pendidikan disekolah.
- b. Bagi pihak penyelenggara sekolah (dinas pendidikan Kab./Kota/Provinsi/Yayasan). Hasil penelitian dapat menjadi

masuk dalam menyusun kebijakan dan program pengembangan kapasitas manajemen sekolah.

E. Struktur Organisasi Penelitian

Secara garis besar struktur organisasi penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bagian atau bab yang dimulai dari Bab I berisi pendahuluan. Kemudian berturut-turut: Bab II berisi Kajian Pustaka, Bab II berisi Metode Penelitian, bab IV berisi Temuan dan Pembahasan, serta bab V berisikan Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi.

1. **BAB I PENDAHULUAN** berisikan beberapa sub bab, diantaranya: Latar Belakang Penelitian; Rumusan Masalah Penelitian; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; serta Struktur Organisasi Penelitian.
2. **BAB II KAJIAN PUSTAKA** berisikan beberapa sub-bab, diantaranya Kajian Pustaka yang dibagi menjadi konsep Kapasitas Manajemen Pendidikan, Konsep Mutu Pendidikan, Kapasitas Manajemen Sekolah terhadap Mutu Pendidikan.
3. **BAB III METODE PENELITIAN** terbagi menjadi sub-bab: Desain Penelitian, Partisipan, Populasi dan Sampel, Instrumen Penelitian, Prosedur Penelitian, serta Analisis Data.
4. **BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, yaitu berisi Hasil Temuan (Analisis Variabel, pengujian persyaratan analisis data, dan uji hipotesis) serta Pembahasan Hasil Penelitian
5. **BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI**, terbagi menjadi sub-bab: Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi